

PENDAPATAN PNS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KASUS PENYIMPANGAN PERJALANAN DINAS DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

Howard Monang Mikael Limbong¹⁾ dan Vid Adrison²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

email: [1howard.limbong@bpk.go.id](mailto:howard.limbong@bpk.go.id)

[2vadrison@gmail.com](mailto:vadrison@gmail.com)

ABSTRACT

The government's obligation to provide public services in all areas of Indonesia became one of the reasons the importance of government spending in public official travel activities. In practice many frauds were found in the implementation of these official travel activities specially in local government. These frauds were carried out through various modes such as fictitious travel activities; double reimbursed travel expenses; and mark up the expenses of the travel. These frauds resulted in the state experiencing a loss of 165,83 billion rupiah during 2015-2017. By using the local state loss due to cases of official travel fraud from BPK RI audit report during 2015-2017 and Tobit Regression, this study aims to examine the determinant of frauds in public official travel activities in local government. The result of the study shows that (1) a negative correlation between average salary of the local public official and the internal financial control system to the loss of state in case of official travel fraud, (2) and a positive correlation between the distance of the local government to Jakarta to the loss of state due to cases of official travel. Empirical evidence from this study is expected to be an input in formulating public policies related to implementation of the official travel in local government.

Keywords: *fraud; internal financial control system; public official salary; public official travel*

ABSTRAK

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan publik diseluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu alasan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk kegiatan perjalanan dinas. Pada prakteknya ditemukan banyak penyimpangan dalam kegiatan perjalanan dinas ini, seperti perjalanan dinas fiktif; pertanggungjawaban gandan; dan *markup* biaya tagihan. Penyimpangan perjalanan dinas ini mengakibatkan kerugian negara total sebesar Rp165,83 miliar selama tahun 2015-2017. Menggunakan data kerugian negara yang diperoleh dari hasil audit BPK RI dan regresi Tobit, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan PNS melakukan penyimpangan perjalanan dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendapatan PNS dan Sistem Pengendalian Internal Keuangan Pemerintah Daerah memiliki korelasi negatif terhadap kasus penyimpangan perjalanan dinas; dan (2) jarak antara pemerintah daerah terhadap Jakarta memiliki korelasi positif terhadap kasus penyimpangan perjalanan dinas. Bukti empiris dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan publik terkait perjalanan dinas di pemerintah daerah.

Kata kunci: gaji PNS; kecurangan; perjalanan dinas; sistem pengendalian internal keuangan

Detail Artikel:

Diterima: 11 Oktober 2019

Disetujui: 2 November 2019

PENDAHULUAN

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap organisasi, negara dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat korupsi yang tinggi memiliki pengaruh terhadap rendahnya capaian penerimaan negara dan kualitas infrastruktur publik (Besley & McLaren, 2006); terhadap rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi negara (Mauro, 1995); dan juga terhadap ketimpangan pendapatan di masyarakat (Gyimah-brempong, 2001).

Penyimpangan perjalanan dinas (*fraud*) merupakan salah satu bentuk perbuatan korupsi yang dilakukan pejabat publik. Menurut definisi *fraud* oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), *fraud* dan korupsi memiliki persamaan, yaitu adanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan di kantor; dan penyalahgunaan asset organisasi untuk tujuan memperkaya diri sendiri ("What Is Fraud?," nd).

Kasus penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015 kasus penyimpangan perjalanan dinas terjadi pada 111 pemerintah daerah, dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 25.475.687.000,00 (BPK RI, 2015), dan terus meningkat hingga pada tahun 2017 kasus ini terjadi pada 232 pemerintah daerah, dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 87.448.950.000,00 (BPK RI, 2017).

Tabel 1
Kerugian Negara Akibat Penyimpangan Perjalanan Dinas

Tahun	Kerugian Negara (Rp)	Total Lokasi Kejadian (Kab/Kota/Prov)
2015	25.475.687.000,00	111
2016	52.909.580.000,00	214
2017	87.448.950.000,00	232

Sumber: BPK RI

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara umum terdapat 3 modus yang sering dilakukan oleh pejabat publik dalam kasus penyimpangan perjalanan dinas di daerah, yaitu:

- Perjalanan dinas fiktif, yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan perjalanan dinas dengan menggunakan bukti transportasi dan akomodasi yang telah direkayasa;
- Pertanggungjawaban ganda, yaitu mempertanggungjawabkan 2 atau lebih kegiatan perjalanan dinas dengan menggunakan bukti transportasi dan akomodasi yang sama;
- Peningkatan tagihan biaya (*markup*), yaitu dengan merekayasa dan melebihkan tagihan pada bukti transportasi dan akomodasi dari yang sebenarnya.

Audit publik terhadap institusi negara diyakini dapat menurunkan tingkat kasus korupsi di pemerintahan, namun berdasarkan hasil audit publik yang dilakukan oleh BPK RI terhadap pemerintah daerah melalui kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun menunjukkan adanya tren peningkatan kasus penyimpangan perjalanan dinas di daerah. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor lain yang menjadi determinan terhadap kasus penyimpangan perjalanan dinas di daerah.

Kontrol internal memiliki peran dalam mengurangi kasus korupsi yang terjadi pada organisasi. Audit publik pada institusi publik akan mengurangi keinginan para pegawai untuk melakukan perbuatan korupsi, selain itu institusi publik yang telah diaudit akan meningkatkan kelemahan dalam sistem kontrol internal organisasi mereka (Liu and Lin, 2012). Hal ini diharapkan dapat mengurangi ruang bagi para pegawai untuk dapat melakukan perbuatan korupsi.

Gaji yang rendah juga diyakini menjadi salah satu alasan pejabat publik memutuskan untuk melakukan perbuatan korupsi. Pejabat publik yang menerima gaji relatif rendah cenderung untuk mencari pendapatan tambahan melalui perbuatan korupsi seperti menerima suap dari pihak swasta (Besley and McLaren, 2006; Kaufmann, 1997). Kemungkinan untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui perbuatan curang diduga menjadi alasan pejabat publik memutuskan untuk melakukan penyimpangan perjalanan dinas di daerah.

Menggunakan estimasi regresi tobit pada 538 observasi selama 3 tahun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah dan gaji rata-rata pegawai negeri sipil di daerah terhadap kasus penyimpangan perjalanan dinas yang terjadi di daerah. Penelitian ini menggunakan data kerugian negara akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas dari BPK RI pada tahun 2015 hingga 2017.

TELAAH LITERATUR

Berdasarkan teori *economic of crime* oleh Becker, disebutkan bahwa perbuatan ilegal/kriminal merupakan hasil dari keputusan rasional dari pelakunya (Becker, 1968). Pelaku dapat memutuskan untuk melakukan perbuatan ilegal/kriminal berdasarkan pertimbangan keuntungan (*benefit*) yang akan diperolehnya dari melakukan perbuatan tersebut dibandingkan dengan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan perbuatan lain yang legal; dan berdasarkan pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh dibandingkan dengan kerugian (*cost*) yang akan dideritanya apabila perbuatannya tersebut ketahuan.

Keuntungan (uang) yang akan diperoleh dari melakukan perbuatan penyimpangan perjalanan dinas merupakan pertimbangan keuntungan (*benefit*) yang dilakukan oleh pejabat publik sebelum memutuskan akan melakukan penyimpangan. Jika keuntungan yang diperoleh dari melakukan penyimpangan perjalanan dinas lebih besar dari gaji rata-rata yang diterima oleh pejabat publik maka pelaku akan memutuskan untuk melakukan penyimpangan. Terdapat penelitian yang mendukung pernyataan ini, yaitu pejabat publik yang dibayar relatif rendah cenderung mencari pendapat lainnya dari sumber yang ilegal sehingga dapat setara dengan pihak swasta lainnya (Besley and McLaren, 2006). Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa pegawai yang memiliki gaji relatif tinggi memiliki resiko yang lebih besar untuk melakukan perbuatan ilegal dibandingkan dengan pegawai yang memiliki gaji relatif rendah (Becker & Stigler, 1974).

Saat ini pegawai negeri sipil (PNS) daerah memperoleh pendapatan yang berasal dari gaji dan tunjangan kinerja setiap bulan. Gaji PNS seluruh daerah hampir sama sesuai dengan pangkat dan golongannya masing-masing, namun memiliki tunjangan kinerja yang berbeda antar daerah. Tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan dari perilaku kerja dan prestasi kerja masing-masing pegawai (Perka Badan Kepegawaian Negara No. 20/2011). Namun untuk nominal uang yang dapat diberikan kepada pegawai diberikan kewenangan kepada masing-masing kepala daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Hal ini yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh PNS antar pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang menjadi pertimbangan biaya (*cost*) dari pelaku sebelum memutuskan untuk melakukan perbuatan ilegal/kriminal. Jika pemerintah daerah memiliki SPI yang baik, maka kemungkinan perbuatan ilegal/kriminal untuk ketahuan akan semakin besar. Sistem Pengendalian Internal yang baik akan membatasi ruang bagi pelaku untuk dapat melakukan perbuatan ilegal/kriminal. Pelaku yang ketahuan melakukan perbuatan ilegal/kriminal akan menerima sanksi yang akan merugikan bagi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian (Liu & Lin, 2012) yang menunjukkan bahwa audit publik pada institusi negara memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kasus korupsi di China. Institusi yang telah diaudit juga akan

memperbaiki kelemahan dalam SPI mereka sehingga akan semakin mempersempit ruang bagi para pelaku perbuatan ilegal/kriminal.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses integral secara terus menerus dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi, diantaranya melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Saat ini sistem pengendalian internal pemerintah daerah rutin diperiksa oleh BPK RI setiap tahun melalui pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kualitas SPI pemerintah daerah merupakan salah satu pertimbangan BPK RI sebelum memutuskan untuk memberikan opini terhadap penyajian laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data panel dari 542 pemerintah daerah selama periode 2015-2017. Variabel dependen yang digunakan adalah rasio dari total kerugian negara akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas terhadap total anggaran belanja barang dan jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah. Penggunaan rasio bertujuan untuk menunjukkan nilai kerugian yang proporsional terhadap kemampuan anggaran masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda antar daerah. Data nilai kerugian daerah diperoleh dari hasil audit LKPD yang dilakukan oleh BPK RI selama periode 2015-2017.

Variabel independen pertama yang digunakan dalam studi ini adalah pendapatan rata-rata pegawai negeri sipil (PNS) pada masing-masing pemerintah daerah. Pendapatan rata-rata ini terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja daerah. Data pendapatan ini diperoleh dari pembagian antara anggaran belanja pegawai tidak langsung pada APBD terhadap total jumlah PNS aktif pada daerah tersebut. Anggaran belanja pegawai tidak langsung merupakan mata anggaran untuk gaji dan tunjangan kinerja pegawai daerah. Pemilihan variable ini mengikuti penelitian dari Besley and McLaren (Besley and McLaren, 2006).

Variabel independen kedua yang digunakan dalam studi ini adalah kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Pengukuran kualitas SPI menggunakan opini atas LKPD yang diberikan BPK RI terhadap pemerintah daerah. Salah satu pertimbangan BPK RI dalam memberikan opini adalah kualitas SPI yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diyakini telah memiliki SPI yang baik. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK RI terhadap pemerintah daerah.

Terdapat 2 variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu luas administratif pemerintah daerah; dan jarak ibukota pemerintah daerah terhadap ibukota negara (Jakarta). Secara umum perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah (di wilayah pemerintah daerah), dan perjalanan dinas luar daerah (pada umumnya dengan tujuan ke ibukota negara). Luas wilayah administratif pemerintah daerah merepresentasikan perjalanan dinas di dalam daerah. Semakin luas wilayah administrasi pemerintah daerah, maka akan dibutuhkan biaya transportasi yang semakin mahal. Jarak ibukota pemerintah daerah terhadap Jakarta merepresentasikan perjalanan dinas luar daerah. Semakin jauh jarak pemerintah daerah terhadap Jakarta, maka akan dibutuhkan biaya transportasi yang semakin mahal.

Berdasarkan teori konseptual dan deskripsi variable yang telah diutarakan, maka spesifikasi model yang diajukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

$$Kerugian_{it} = \beta_0 + \beta_1(Pendapatan_{it}) + \beta_2(d_SPI_{it1}) + \beta_3(Luas_i) + \beta_4(Jarak_i) + u_{it}$$

Untuk $i = 1, 2, \dots, N$ menunjukkan jumlah kabupaten/kota/provinsi yang diobservasi (*cross section*); dan $t = 1, 2, \dots, T$ menunjukkan periode waktu dalam tahun (*time series*), dimana β_0 = intersep; *Kerugian* = Rasio antara nilai kerugian daerah yang terjadi akibat kasus

penyimpangan perjalanan dinas terhadap anggaran belanja barang dan jasa masing-masing pemerintah daerah; *Pendapatan* = pendapatan rata-rata (gaji dan tunjangan kinerja) PNS pemerintah daerah dalam 1 bulan; *d_SPI* = *dummy* daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK RI, dimana daerah yang memperoleh opini WTP diberi nilai 1 sedangkan lainnya diberi nilai 0; *Luas* = Logaritma Natural dari luas wilayah administratif pemerintah daerah; *Jarak* = Logaritma Natural (*Jarak* + 1) jarak antara ibukota pemerintah daerah terhadap kota Jakarta. Statistik data yang akan diuji dalam spesifikasi model ini dapat dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Data
Satuan Kerugian & Pendaptan dalam Juta Rupiah

Variabel	Observasi	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Kerugian	538	161,48	449,89	0	5513,33
Pendapatan	538	8,86	2,00	1,11	25,95
d_SPI	538	0,76	0,42	0	1
Luas	538	7097,72	20593,81	16,06	319036,1
Jarak	538	1572,05	1012,752	0	4206,8

Sumber: diolah penulis

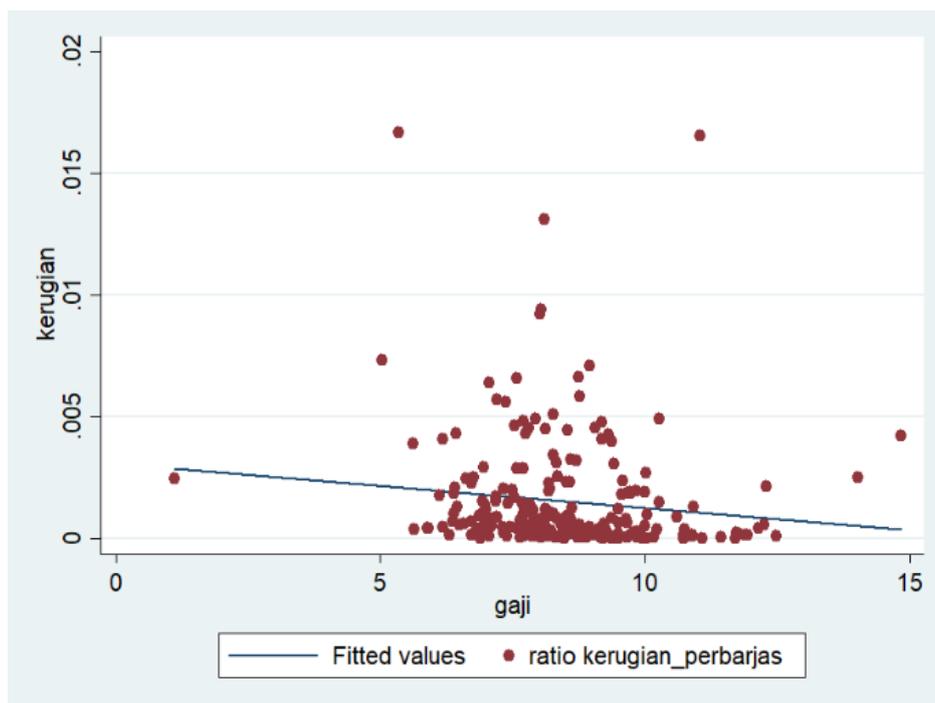
Karena banyaknya observasi variabel kerugian yang bernilai 0, maka studi ini menggunakan metode estimasi regresi tobit. Terdapat 308 dari total 538 observasi variabel dependen yang bernilai "0". Nilai "0" ini tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa di daerah tersebut sama sekali tidak terjadi kasus penyimpangan perjalanan dinas, namun terdapat kemungkinan bahwa terdapat kasus penyimpangan perjalanan dinas pada pemerintah daerah tersebut namun tidak diperiksa oleh BPK RI. Hal ini mungkin dapat terjadi karena BPK RI dalam melakukan audit menggunakan metode sampling. Metode ini hanya menggunakan beberapa sampel pemeriksaan untuk dapat mewakili seluruh pemerintah daerah.

Solusi terhadap permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode estimasi regresi tobit. Regresi Tobit dapat melakukan sensor pada batas bawah (daerah yang memiliki kerugian 0) sehingga dapat menghasilkan hasil estimasi yang lebih presisi. Gujarati mensyaratkan penggunaan metode tobit apabila terdapat kondisi tersensornya data pada variabel dependen, sedangkan variabel independen tidak terbatas (Gujarati, 2001). Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan regresi *Ordinary Least Square* (OLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data

Pada Gambar 1 menunjukkan adanya hubungan negatif antara pendapatan rata-rata terhadap rasio kerugian negara akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pemerintah daerah yang pendapatan rata-rata PNS-nya relatif tinggi cenderung memiliki nilai kerugian daerah/kasus penyimpangan perjalanan dinas yang rendah.



Gambar 1
Tren Pendapatan terhadap Kerugian

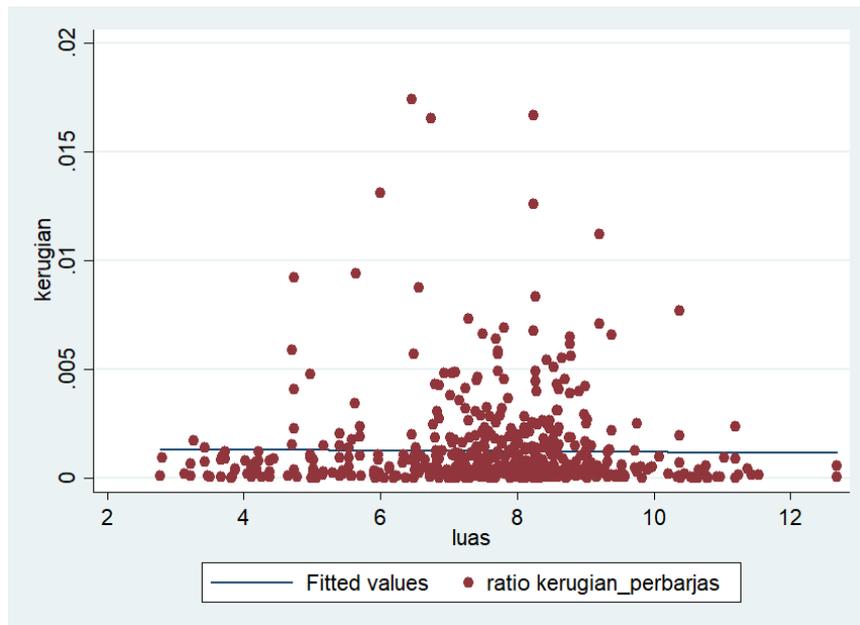
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kasus penyimpangan perjalanan dinas terjadi lebih banyak sebesar 591 kasus pada daerah yang memiliki kualitas SPI yang baik (memperoleh opini WTP dari BPK RI) dibandingkan dengan daerah yang belum memperoleh opini WTP, namun rata-rata nilai kerugian yang terjadi akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas justru lebih tinggi pada daerah yang belum memperoleh opini WTP. Daerah yang belum memperoleh opini WTP dari BPK memiliki nilai kerugian lebih besar rata-rata sebesar Rp42.430.000,00 lebih tinggi daripada daerah memperoleh opini WTP.

Tabel 3
Crosstab Daerah memperoleh WTP dengan Nilai Kerugian

Kualitas SPI	Mean	Max	Min	N
Tidak memperoleh WTP	132,16	4169,06	0	503
Memperoleh WTP	89,73	5513,33	0	1094
Selisih	42,43			591

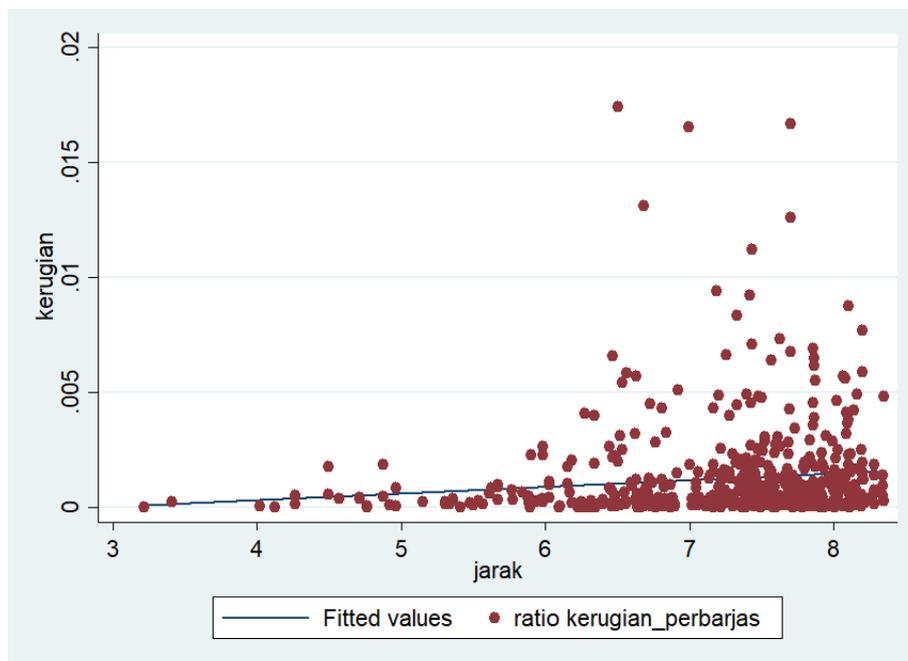
Sumber: diolah penulis

Pada Gambar 2 menunjukkan adanya hubungan positif antara luas wilayah administratif daerah terhadap rasio kerugian negara akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pemerintah daerah yang memiliki luas daerah yang besar cenderung memiliki nilai kerugian daerah/kasus penyimpangan perjalanan dinas yang rendah. Hal ini mungkin dapat terjadi karena karena luas wilayah akan mempengaruhi biaya transportasi yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas. Semakin luas wilayah maka biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dinas akan semakin tinggi.



Gambar 2
Tren Luas Wilayah terhadap Kerugian

Pada Gambar 3 menunjukkan adanya hubungan positif antara jarak daerah ke Jakarta terhadap rasio kerugian negara akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pemerintah daerah yang memiliki jarak daerah yang jauh ke Jakarta cenderung memiliki nilai kerugian daerah/kasus penyimpangan perjalanan dinas yang rendah. Hal ini mungkin dapat terjadi karena karena luas wilayah akan mempengaruhi biaya transportasi yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas. Semakin jauh jaraknya maka biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dinas akan semakin tinggi.



Gambar 3
Tren Jarak terhadap Kerugian

Hasil Utama

Uji empiris dilakukan dengan melakukan estimasi beberapa spesifikasi model sebagaimana tersaji pada tabel 4.2. Pada kolom (1) menggunakan regresi OLS; kolom (2) model dasar dengan menggunakan regresi tobit; kolom (3) *robustness check* model dasar dengan menggunakan *year effect*; kolom (4) *robustness check* model dasar dengan menambahkan variabel kuadrat untuk menguji hubungan linear variabel.

Tabel 4
Hasil Estimasi Model

Variabel	OLS		Regresi Tobit	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan	-0.00000387 (0.0000196)	-0.000115 ** (0.0000473)	-0.000286 *** (0.0000515)	-0.0000359 (0.000213)
SPI	-0.000158 * (0.0000828)	-0.000423 ** (0.000184)	-0.000652 *** (0.000183)	-0.000468 * (0.000243)
Luas	-0.0000175 (0.0000265)	-0.00000483 (0.0000528)	0.0000185 (0.0000519)	-0.00000266 (0.0000529)
Jarak	0.000140 *** (0.0000480)	0.000390 *** (0.000104)	0.000300 *** (0.000104)	0.000397 *** (0.000105)
Pendapatan ²				-0.00000428 (0.0000113)
year effect	N	N	Y	N
Constant	-0.000252 (0.000427)	-0.00273 *** (0.000937)	-0.00209 ** (0.000942)	-0.00320 ** (0.00137)
Sigma		0.00276 *** (0.0000908)	0.00266 *** (0.0000868)	0.00276 *** (0.0000908)
N	1597	1597	1597	1597
r ²				

Catatan: tingkat keyakinan 99% (***), 95% (**), 90% (*). Standar error robust pada tanda kurung

Pada model (1) yang menggunakan regresi OLS menunjukkan hasil bahwa variabel SPI dan Jarak saja yang signifikan dengan signifikansi masing-masing pada tingkat keyakinan 90% dan 99%. Sedangkan pada model (2), (3) dan (4) yang menggunakan regresi tobit terdapat tambahan variabel signifikan yaitu gaji. Selain itu tingkat signifikansi SPI juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan regresi tobit lebih tepat digunakan untuk mengestimasi spesifikasi model yang memiliki kendala pada variabel dependennya (tersensornya batas bawah pada variabel dependen).

Perbandingan antara model (2) dengan model (3) yang menggunakan *year effect*, menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan arah korelasi pada variabel. Hal ini menunjukkan spesifikasi model telah *robust* pada model yang menggunakan *year effect*. Model (3) juga menunjukkan peningkatan signifikansi pada variabel-variabelnya apabila dibandingkan dengan model (2). *Year effect* digunakan untuk mengatasi adanya kemungkinan *omitted variable bias*, yaitu adanya variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam spesifikasi model namun mempengaruhi model dan berubah sepanjang waktu.

Perbandingan antara model (3) dengan model (4) menunjukkan bahwa variabel pendapatan benar-benar memiliki hubungan linear terhadap penyimpangan perjalanan dinas. Penambahan variabel kuadrat yaitu pendapatan² pada spesifikasi model adalah untuk menguji konsistensi arah korelasi variabel. Hasil pengujian menunjukkan variabel pendapatan dengan

pendapatan² konsisten menunjukkan arah hubungan yang negatif terhadap penyimpangan perjalanan dinas, namun penambahan variabel kuadrat ini berdampak pada hilangnya signifikansi variabel pendapatan pada model (4). Hal ini disebabkan adanya multikolinearitas antara pendapatan dengan pendapatan² sebab variabel pendapatan² merupakan hasil kuadrat dari variabel pendapatan.

Berdasarkan hasil estimasi keseluruhan model, maka spesifikasi model yang dipilih adalah model (3), yaitu model yang menggunakan regresi tobit dan *year effect*. Regresi tobit dapat mengatasi kendala tersensornya batas bawah pada variabel dependen, dan *year effect* yang mengatasi adanya kemungkinan *omitted variable bias* yang mempengaruhi model dan berubah sepanjang waktu. Hasil pada model (3) juga menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model lainnya.

SIMPULAN

Pendapatan rata-rata menunjukkan hubungan negatif dengan kerugian negara yang timbul akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Hal ini menunjukkan bahwa pada daerah yang pegawainya memiliki pendapatan rata-rata relatif rendah cenderung mencari tambahan penghasilan dengan melakukan kecurangan pada kegiatan perjalanan dinas. Sebaliknya, pada daerah yang pegawainya memiliki pendapatan rata-rata relatif tinggi cenderung untuk menghindari melakukan kecurangan pada kegiatan perjalanan dinas. Pegawai yang telah menerima pendapatan yang relative tinggi memiliki resiko kehilangan pendapatan yang lebih besar apabila perbuatan curangnya ketahuan. Hal ini sesuai dengan penelitian Becker & Stigler (Becker & Stigler, 1974).

Sistem Pengendalian Internal juga menunjukkan hubungan negatif terhadap kerugian negara yang terjadi akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki SPI yang baik (memperoleh opini WTP dari BPK RI) cenderung mempersempit ruang bagi para pegawai yang ingin melakukan kecurangan pada kegiatan perjalanan dinas. Hal ini konsisten dengan penelitian oleh Liu yang menyatakan bahwa audit publik dan sistem pengendalian dalam organisasi memiliki efek negatif terhadap tingkat korupsi.

Jarak ke Jakarta menunjukkan hubungan yang positif terhadap kerugian negara yang terjadi akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang terletak jauh dari Jakarta cenderung memiliki nilai kerugian akibat kasus perjalanan dinas yang lebih tinggi daripada daerah yang dekat ke Jakarta. Hal ini mungkin dapat terjadi akibat adanya perbedaan tarif transportasi, akomodasi dan uang harian antara kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dengan kegiatan perjalanan dinas luar daerah (ke Jakarta). Perjalanan dinas luar daerah (ke Jakarta) memiliki tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjalanan dinas dalam daerah. Perbedaan tarif ini diduga memotivasi pelaku untuk melakukan kecurangan pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang memiliki tarif lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori *economic of crime* oleh Becker yang menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan perbuatan ilegal/kriminal akan dilakukan apabila *benefit* yang diperoleh akan lebih besar dari *cost* yang mungkin akan diperolehnya (Becker, 1968).

Rekomendasi

Saat ini pemerintah pusat telah memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SPI-nya dengan memberikan dana insentif sebesar Rp2.000.000.000,00 bagi daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan memperoleh opini WTP dari BPK RI (PMK No. 8/2014). Pemberian dana ini bertujuan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas SPI pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing. Namun dana insentif tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pendidikan untuk masyarakat saja. Apabila dana insentif ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan

PNS melalui peningkatan tunjangan kinerja daerah, maka diharapkan akan memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SPI mereka dan mengurangi motivasi PNS untuk melakukan perbuatan penyimpangan perjalanan dinas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Vid Adrison selaku pembimbing penulis pada Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPEKP) Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (UI) tempat penulis menempuh Pendidikan, dan juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tempat penulis bekerja dan mengabdikan. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat saya abdikan pada kantor dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sosa, L. (2004). Wages and Other Determinants of Corruption. In *Review of Development Economics* (Vol. 8). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2004.00255.x>
- Becker, GS (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. Columbia University, 75 (2), 139-146.
- Becker, GS, & Stigler, GJ (1974). Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers. *The Journal of Legal Studies*, 3 (1), 1-18. <https://doi.org/10.1086/467507>
- Besley, T., & McLaren, J. (2006). Taxes and Bribery: The Role of Wage Incentives. *The Economic Journal*, 103 (416), 119. <https://doi.org/10.2307/2234340>
- BPK. (2015). Overview First Semester Examination Results 2015. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- BPK. (2016). Examination Results Financial Highlights First Half Year 2016 <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- BPK. (2017). Examination Results Financial Highlights First Half Year 2017. Retrieved from <http://www.bpk.go.id/ihps>
- Di Tella, R., & Schargrodsky, E. (2001). The Role of Wages and Auditing During a Crackdown on Corruption in the City of Buenos Aires. *Ssrn*, 46 (1), 269-292. <https://doi.org/10.2139/ssrn.269490>
- Gujarati, DN (2001). *Basic Econometrics*. In Jakarta: Erland. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.02.043>
- Gyimah-brempong, K. (2001). Corruption, economic growth, and income in Africa. *Economic of Governance*; University of South Florida, (February 2000), 183-209.
- Kaufmann, D. (1997). Corruption: The Facts. *Foreign Policy*, No. 107. Pp. 114-131.
- Lambsdorff, JG (2002). Corruption and Rent-Seeking. *Public Choice*, 113 (1), 97-125.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *Chinese Journal of Accounting Research*, 5 (2), 163-186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110 (3), 712. Retrieved from <https://doi.org/10.2307/2946696>
- What Is a Fraud? (Nd). Retrieved from the Association of Certified Fraud Examiner website: <https://www.acfe.com/fraud-101.aspx>